BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
NOMOR: 180.182/ 278 /KEP/18/2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2025

BUPATI MAGELANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dalam tahun berjalan menunjukkan ketidakseimbangan dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah berkenaan dan/atau keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, sehingga telah dilakukan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 22 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;

b. bahwa dalam rangka penyesuaian Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dengan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 perlu menyusun Perubahan Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang Tahun 2025;

c. bahwa terhadap Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang Tahun 2025 telah dilakukan verifikasi dan selaras dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 22 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025;

d. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 367 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Bappeda menyampaikan seluruh rancangan akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;

ASISTEN EKBANG	KEPALA DISPETERIKAN	KABAG PEREKONOMIAN DAN SDA	KABAG HUKUM

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);

7. Peraturan Bupati Magelang Nomor 22 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025 Nomor 22);

ASISTEN EKBANG	KEPALA DISPETERIKAN	KABAG PEREKONOMIAN DAN SDA	KABAG HUKUM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Perubahan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan perencanaan pembangunan Perangkat Daerah dalam periode 1 (satu) tahun.

KETIGA : Perubahan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah pada perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 3 juli 2025

BUPATI MAGELANG,

GRENGSENG PAMUJI

ASISTEN EKBANG	KEPALA DISPETERIKAN	KABAG PEREKONOMIAN DAN SDA	KABAG HUKUM

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
NOMOR: 180.182/ 278 /KEP/18/2025
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2025

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan berperan sangat penting dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah merupakan upaya terencana untuk memberdayakan dan meningkatkan kapasitas masyarakat dan potensi yang dimiliki daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tersebut dilakukan melalui serangkaian pelaksanaan pembangunan daerah dari berbagai aspek baik ekonomi, sosial, budaya, infrastruktur maupun aspek lainnya.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu dua puluh tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka lima tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu satu tahun.

Salah satu dokumen perencanaan jangka pendek (tahunan) yang harus disusun oleh Perangkat Daerah adalah Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat menjadi Renja PD. Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Perubahan Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Perikanan (Renja PD) sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang merupakan penjabaran dari Perubahan Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan 2025-2026 yang memuat prioritas program dan kegiatan.

Penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja PD Dinas Peternakan dan Perikanan tahun 2025 mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RPD tahun 2025 serta evaluasi pelaksanaan Renja PD sampai dengan Triwulan I dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra SKPD. Dokumen ini juga tidak bisa dilepaskan dari arahan yang termuat dalam perubahan RPD Kabupaten Magelang tahun 2025-2026 dan Perubahan Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Perikanan tahun 2025-2026. Hal tersebut untuk menjamin kesesuaian antara matrik program, kegiatan, sub kegiatan, indikator antar dokumen perencanaan sehingga tercipta keselarasan arah.

ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	KEPALA DISPETERIKAN	KABAG PEREKONOMIAN DAN SDA	KABAG HUKUM

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dilaksanakannya Penyusunan Perubahan Renja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
7. Peraturan Bupati Magelang Nomor 22 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025 (Berita Daerah Kabuapten Magelang Tahun 2025 Nomor 22).

1.3. Maksud dan Tujuan

Dokumen Perubahan Renja Dinas Peternakan dan Perikanan Tahun 2025 disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut :

1.3.1. Maksud

Perubahan Renja Dinas Peternakan dan Perikanan Tahun 2025 disusun dengan maksud untuk memberikan arah pelaksanaan pembangunan jangka pendek (tahunan) dan sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan program pembangunan jangka pendek (tahunan).

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Perubahan Renja Dinas Peternakan dan Perikanan 2025 yaitu untuk menselaraskan program dan kegiatan pada Dinas Peternakan dan Perikanan Tahun 2025 dengan target dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Magelang yang dimuat dalam Dokumen RPD Kabupaten Magelang Tahun 2025-2026.

1.4. Sistematika

Dokumen Perubahan Renja Dinas Peternakan dan Perikanan 2025 di formulasikan dalam sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN SAMPAI DENGAN TRI WULAN I TAHUN 2025
- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Peterikan Sampai Dengan Tri Wulan I Tahun 2025
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN 2025 SAMPAI DENGAN TRIWULAN I

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Peternakan dan Perikanan Sampai Dengan Tri Wulan I Tahun 2025

Pelaksanaan Renja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang diimplementasikan dalam pencapaian pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang tercakup pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang. Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Peternakan dan Perikanan sampai dengan Triwulan I tahun 2025 memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Peternakan dan Perikanan sampai dengan TriwulanI tahun 2025 dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun 2025), mengacu pada APBD tahun 2025 yang sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan tahun 2025-2026 berdasarkan realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan sampai dengan Triwulan I tahun 2025.

Review hasil evaluasi evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Peternakan dan Perikanan sampai dengan Triwulan I tahun 2025, dan realisasi Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan mengacu pada hasil laporan evaluasi Renja Dinas Peternakan dan Perikanan sampai dengan Triwulan I tahun 2025.

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Peternakan dan Perikanan sampai dengan Triwulan I tahun 2025 secara lengkap disajikan dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan I Tahun 2025
Kabupaten Magelang

Nama Perangkat Daerah : Dinas Peternakan dan Perikanan

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)					Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2025		Realisasi Renja Perangkat Daerah s.d. TW I tahun 2025		Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5		6		7=(6/5)	8=5	9=(8/4)
3	25				URUSAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Produksi Ikan Air Tawar (Benih)	1.916.523,00	x 1000 ekor	1.906.989,00	x 1000 ekor	668.536,00	x 1000 ekor	35,06	1.906.989,00	99,50
						Produksi Ikan Air Tawar (Untuk Lauk Pauk)	20.431,00	ton	20.410,00	ton	6.129,60	ton	30,03	20.410,00	99,90
						Produksi ikan hias	2.765.660,00	ekor	2.685.107,00	ekor	870.006,00	ekor	32,40	2.685.107,00	97,09
3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	100,00	%	100,00	%	31,46	%	31,46	100,00	100,00
						2. Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	100,00	%	100,00	%	31,46	%	31,46	100,00	100,00
3	25	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang tersusun	48,00	dokumen	24,00	dokumen	6,00	dokumen	25,00	24,00	50,00
3	25	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8,00	dokumen	4,00	dokumen	1,00	dokumen	25,00	4,00	50,00
3	25	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	40,00	laporan	20,00	laporan	5,00	laporan	25,00	20,00	50,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)					Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2025		Realisasi Renja Perangkat Daerah s.d. TW I tahun 2025		Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5		6		7=(6/5)	8=5	9=(8/4)
3	25	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang dilaksanakan	100,00	%	100,00	%	27,00	%	27,00	100,00	100,00
3	25	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56,00	orang/bulan	56,00	orang/bulan	52,00	orang/bulan	92,86	56,00	100,00
3	25	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48,00	dokumen	24,00	dokumen	6,00	dokumen	25,00	24,00	50,00
3	25	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum yang dilaksanakan	100,00	%	100,00	%	25,00	%	25,00	100,00	100,00
3	25	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24,00	laporan	12,00	laporan	3,00	laporan	25,00	12,00	50,00
3	25	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang yang dilaksanakan	100,00	%	100,00	%	24,00	%	24,00	100,00	100,00
3	25	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4,00	unit	2,00	unit	-	unit	-	2,00	50,00
3	25	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4,00	unit	2,00	unit	-	unit	-	2,00	50,00
3	25	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang yang dilaksanakan	100,00	%	100,00	%	28,50	%	28,50	100,00	100,00
3	25	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	24,00	laporan	12,00	laporan	3,00	laporan	25,00	12,00	50,00
3	25	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	24,00	laporan	12,00	laporan	3,00	laporan	25,00	12,00	50,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)					Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2025		Realisasi Renja Perangkat Daerah s.d. TW I tahun 2025		Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5		6		7=(6/5)	8=5	9=(8/4)
						Daya Air dan Listrik yang Disediakan									
3	25	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang yang dilaksanakan	100,00	%	100,00	%	31,75	%	31,75	100,00	100,00
3	25	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaaan,Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	53,00	unit	53,00	unit	53,00	unit	25,00	53,00	100,00
3	25	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40,00	unit	40,00	unit	40,00	unit	25,00	40,00	100,00
3	25	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6,00	unit	3,00	unit	1,00	unit	33,33	3,00	50,00
3	25	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	30,00	unit	30,00	unit	30,00	unit	25,00	30,00	100,00
3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Cakupan pengelolaan perikanan budidaya	100,00	%	100,00	%	26,25	%	26,25	100,00	100,00
3	25	04	2.02		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah kelompok yang terfasilitasi pemberdayaan	62,00	kelompok	31,00	kelompok	23,75	kelompok	76,61	31,00	50,00
3	25	04	2.02	01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	6,00	kelompok	3,00	kelompok	-	kelompok	-	3,00	50,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)					Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2025		Realisasi Renja Perangkat Daerah s.d. TW I tahun 2025		Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5		6		7=(6/5)	8=5	9=(8/4)
3	25	04	2.02	02	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	28,00	kelompok	14,00	kelompok	-	kelompok	-	14,00	50,00
3	25	04	2.02	03	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya	10,00	kelompok	5,00	kelompok	-	kelompok	-	5,00	50,00
3	25	04	2.02	04	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	2,00	kelompok	1,00	kelompok	-	kelompok	-	1,00	50,00
3	25	04	2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Cakupan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	100,00	%	100,00	%	28,75	%	28,75	100,00	100,00
3	25	04	2.04	01	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	8,00	dokumen	4,00	dokumen	-	dokumen	-	4,00	50,00
3	25	04	2.04	02	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	-	-
3	25	04	2.04	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4,00	unit	2,00	unit	1,00	unit	50,00	2,00	50,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)					Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2025		Realisasi Renja Perangkat Daerah s.d. TW I tahun 2025		Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5		6		7=(6/5)	8=5	9=(8/4)
3	25	04	2.04	04	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	8,00	dokumen	4,00	dokumen	1,00	dokumen	25,00	4,00	50,00
3	25	04	2.04	05	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	80,00	orang	40,00	orang	-	orang	-	40,00	50,00
3	25	05			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Cakupan pengembangan pengawasan sumberdaya perikanan	100,00	%	100,00	%	30,00	%	30,00	100,00	100,00
3	25	05	2.01		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	1. Persentase penebaran ikan di perairan umum	100,00	%	100,00	%	30,00	%	30,00	100,00	100,00
						2. Jumlah lokasi pengawasan sungai dan genangan air lainnya	10,00	lokasi	5,00	lokasi	1,00	lokasi	20,00	5,00	50,00
3	25	05	2.01	01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	2,00	dokumen	1,00	dokumen	-	dokumen	-	1,00	50,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)					Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2025		Realisasi Renja Perangkat Daerah s.d. TW I tahun 2025		Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5		6		7=(6/5)	8=5	9=(8/4)
3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	1. Cakupan optimalisasi pengolahan dan pemasaran produksi perikanan	100,00	%	100,00	%	20,83	%	20,83	100,00	100,00
						2. Angka konsumsi ikan	24,00	kg/kapita/tahun	23,10	kg/kapita/tahun	23,10	kg/kapita/tahun	100,00	23,10	96,25
3	25	06	2.01		Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan	Persentase Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan (KUSUKA)	100,00	%	100,00	%	40,00	%	40,00	100,00	100,00
3	25	06	2.01	01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	2,00	dokumen	1,00	dokumen	-	dokumen	25,00	1,00	50,00
3	25	06	2.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Persentase Pembinaan Mutu Olahan Hasil Perikanan	100,00	%	100,00	%	25,00	%	25,00	100,00	100,00
3	25	06	2.02	01	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	300,00	Unit	150,00	Unit	45,00	Unit	30,00	150,00	50,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)					Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2025		Realisasi Renja Perangkat Daerah s.d. TW I tahun 2025		Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5		6		7=(6/5)	8=5	9=(8/4)
3	25	06	2.03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase fasilitasi penyediaan bahan baku pengolahan ikan	100,00	%	100,00	%	19,50	%	19,50	100,00	100,00
3	25	06	2.03	01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	10,00	ton	4,80	ton	1,25	ton	26,04	4,80	48,00
3	25	06	2.03	02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	450,00	pelaku usaha	200,00	pelaku usaha	30,00	pelaku usaha	15,00	200,00	44,44
3	27				URUSAN PERTANIAN	Produksi daging (ruminansia dan non ruminansia)	17.187,01	ton	17.152,71	ton	3.328,11	ton	19,40	17.152,71	99,80
						Produksi Telur	18.005,22	ton	17.978,34	ton	3.340,90	ton	18,58	17.978,34	99,85
						Produksi susu	889.169,87	liter	888.959,91	liter	222.167,23	liter	24,99	888.959,91	99,98
3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Cakupan Penyediaan dan Pengembangan Sarana Produksi Peternakan	100,00	%	100,00	%	28,75	%	28,75	100,00	100,00
3	27	02	2.02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan	8,00	dokumen	4,00	dokumen	1,00	dokumen	25,00	4,00	50,00
3	27	02	2.02	02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	4,00	dokumen	2,00	dokumen	1,00	dokumen	50,00	2,00	50,00
3	27	02	2.02	03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	4,00	dokumen	2,00	dokumen	1,00	dokumen	50,00	2,00	50,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)					Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2025		Realisasi Renja Perangkat Daerah s.d. TW I tahun 2025		Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5		6		7=(6/5)	8=5	9=(8/4)
3	27	02	2.05		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakaan Ternak	100,00	%	100,00	%	-	%	-	100,00	100,00
3	27	02	2.05	01	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Beredar	180,00	ekor	90,00	ekor	-	ekor	-	90,00	50,00
3	27	02	2.05	4	Penjaminan Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah HPT, Bahan Pakan/Pakan yang Beredar	720,00	ton	240,00	ton	-	ton	-	240,00	33,33
3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Cakupan Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Produksi Peternakan	100,00	%	100,00	%	-	%	-	100,00	100,00
3	27	03	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Pembangunan Prasarana Peternakan yang terbangun/terpelihara	2,00	unit	-	unit	-	unit	-	-	-
3	27	03	2.02	01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi , dan Dipelihara	-	unit	-	unit	-	unit	-	-	-
3	27	03	2.02	03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	2,00	unit	-	unit	-	unit	-	-	-
3	27	03	2.02	07	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	-	unit	-	unit	-	unit	-	-	-
3	27	03	2.02	09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	-	unit	-	unit	-	unit	-	-	-

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)					Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2025		Realisasi Renja Perangkat Daerah s.d. TW I tahun 2025		Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5		6		7=(6/5)	8=5	9=(8/4)
3	27	03	2.03		Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Presentase Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	100,00	%	100,00	%	20,00	%	20,00	100,00	100,00
3	27	03	2.03	01	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan	24,00	laporan	12,00	laporan	3,00	laporan	25,00	12,00	50,00
3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Cakupan pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan	100,00	%	100,00	%	18,67	%	18,67	100,00	100,00
3	27	04	2.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan pencegahan penyakit hewan menular	100,00	%	100,00	%	16,00	%	16,00	100,00	100,00
3	27	04	2.01	01	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	24,00	laporan	12,00	laporan	3,00	laporan	25,00	12,00	50,00
3	27	04	2.02		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	100,00	%	100,00	%	25,00	%	25,00	100,00	100,00
3	27	04	2.02	02	Analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	Jumlah Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	24,00	laporan	12,00	laporan	2,00	laporan	16,67	12,00	50,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)					Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2025		Realisasi Renja Perangkat Daerah s.d. TW I tahun 2025		Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5		6		7=(6/5)	8=5	9=(8/4)
3	27	04	2.02	03	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Jumlah Analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	16,00	laporan	8,00	laporan	3,00	laporan	37,50	8,00	50,00
					Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner	100,00	%	100,00	%		%	-	100,00	100,00
					Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	24,00	laporan	-	laporan	-	laporan	-	-	-
3	27	04	2.04		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Pengawasan Kesehatan Masyarakat Veteriner	100,00	%	100,00	%	15,00	%	15,00	100,00	100,00
3	27	04	2.04	02	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	24,00	laporan	12,00	laporan	3,00	laporan	25,00	12,00	50,00
3	27	04	2.04	04	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	8,00	dokumen	4,00	dokumen	1,00	dokumen	25,00	4,00	50,00
3	27	04	2.05	01	Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Kesmavet dan Kesejahteraan Hewan	Jumlah Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	42,00	laporan	21,00	laporan	-	laporan	-	21,00	50,00
3	27	06			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Cakupan pengawasan peredaran obat hewan	100,00	%	100,00	%	25,00	%	25,00	100,00	100,00
3	27	06	2.03		Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan	Persentase pengawasan peredaran obat hewan	100,00	%	100,00	%	25,00	%	25,00	100,00	100,00
3	27	06	2.03	02	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Diawasi	24,00	laporan	12,00	laporan	3,00	laporan	25,00	12,00	50,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)					Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2025		Realisasi Renja Perangkat Daerah s.d. TW I tahun 2025		Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5		6		7=(6/5)	8=5	9=(8/4)
3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Cakupan pembinaan kelompok ternak	100,00	%	100,00	%	14,50	%	14,50	100,00	100,00
3	27	07	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Fasilitasi Pembinaan Kelompok Ternak	100,00	%	100,00	%	14,50	%	14,50	100,00	100,00
3	27	07	2.01	02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	60,00	unit	30,00	unit	-	unit	-	30,00	50,00
3	27	07	2.01	03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	2,00	unit	1,00	unit	-	unit	-	1,00	50,00

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, terkait dengan interprestasi atas pencapaian sasaran dan Program/Kegiatan serta indikator makro diberlakukan nilai disertai makna nilai tersebut disajikan pada Tabel 1.1. sebagai berikut:

Tabel 2.2 Interprestasi Atas Pencapaian Sasaran Dan Program/Kegiatan Serta Indikator Makro

No	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

Pada triwulan pertama tahun anggaran 2025, secara umum kegiatan yang telah tertuang dalam Rencana Kerja tahun 2025 sudah dilaksanakan. Berikut capaian target kinerja dari masing-masing program:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

   - Indikator : Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah
   - Capaian kinerja : 31,46 %
   - Predikat Kinerja : Sangat Rendah
   - Realisasi anggaran : Rp. 2.198.635.073,00
   - Predikat Kinerja Anggaran : Sangat Rendah

2. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

   - Indikator : Cakupan Pengelolaan Perikanan Budidaya
   - Capaian kinerja : 26,25 %
   - Predikat Kinerja : Sangat Rendah
   - Realisasi anggaran : Rp. 95.966.837,00
   - Predikat Kinerja Anggaran : Sangat Rendah

3. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

   - Indikator : Cakupan Pengembangan Pengawasan Pembinaan Sumberdaya Perikanan
   - Capaian kinerja : 30,00 %
   - Predikat Kinerja : Sangat Rendah
   - Realisasi anggaran : Rp. 5.972.720,00
   - Predikat Kinerja Anggaran : Sangat Rendah

4. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

   - Indikator : Cakupan Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan
     Angka Konsumsi Ikan (27,11 kg/kapita/thn
   - Capaian kinerja : 20,83 %

- Predikat Kinerja : Sangat Rendah
- Realisasi anggaran : Rp. 44.238.538,00
- Predikat Kinerja Anggaran : Sangat Rendah

5. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

- Indikator : Cakupan Penyediaan dan Pengembangan Sarana Produksi Peternakan
- Capaian kinerja : 28,80 %
- Predikat Kinerja : Sangat Rendah
- Realisasi anggaran : Rp. 25.330.080,00
- Predikat Kinerja Anggaran : Sangat Rendah

6. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

- Indikator : Cakupan Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Produksi Peternakan
- Capaian kinerja : 20,00 %
- Predikat Kinerja : Sangat Rendah
- Realisasi anggaran : Rp. 26.698.593,00
- Predikat Kinerja Anggaran : Sangat Rendah

7. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

- Indikator : Cakupan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan
- Capaian kinerja : 18,67 %
- Predikat Kinerja : Sangat Rendah
- Realisasi anggaran : Rp. 46.609.804,00
- Predikat Kinerja Anggaran : Sangat Rendah

8. Program Perizinan Usaha Pertanian

- Indikator : Cakupan Pengawasan Peredaran Obat Hewan
- Capaian kinerja : 25,00 %
- Predikat Kinerja : Sangat Rendah
- Realisasi anggaran : Rp. 5.653.080,00
- Predikat Kinerja Anggaran : Sangat Rendah

9. Program Penyuluhan Pertanian

- Indikator : Cakupan Pembinaan Kelompok Ternak
- Capaian kinerja : 14,50 %
- Predikat Kinerja : Sangat Rendah
- Realisasi anggaran : Rp. 6.436.080,00
-
- Predikat Kinerja Anggaran : Sangat Rendah

Pelaksanaan Renja Dinas Peternakan dan Perikanan tahun 2025 yang dikelola Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang tercermin dalam 9 program dengan total anggaran penetapan DPA yang dikelola pada Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 11.740.644.695. Adapun target penyerapan anggaran sampai dengan triwulan I sebesar Rp. 2.822.520.743,- terealisasi sebesar Rp. 2.455.540.805,- (86,99%) atau 21,16% terhadap anggaran.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang No. 69 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang, tugas pokok dan fungsi Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang yaitu melaksanakan:

1. Tugas Pokok

Dinas Peternakan dan Perikanan mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian sub urusan peternakan dan bidang perikanan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

2. Fungsi

Dinas Peternakan dan Perikanan mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan bidang peternakan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, budidaya perikanan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, serta kesekretariatan;
b. Pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang peternakan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, budidaya perikanan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
c. Pelaksanaan kebijakan bidang peternakan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, budidaya perikanan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
d. Pelaksanaan administrasi bidang peternakan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, budidaya perikanan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
e. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan Dinas Peternakan dan Perikanan;
f. Pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis;
g. Pelaksanaan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada daerah bidang peternakan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, budidaya perikanan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
h. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang peternakan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, budidaya perikanan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Peternakan dan Perikanan bertugas membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan dan bidang pertanian sub sektor peternakan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Dalam rangka

pencapaian tujuan dan sasaran bidang kelautan dan perikanan bidang pertanian sub sektor peternakan yang dirumuskan dalam RPJMD Kabupaten Magelang tahun 2025-2026, Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang telah menetapkan seperangkat kinerja untuk dijadikan sebagai ukuran keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan indikator sasaran perangkat daerah, dipertanggungjawabkan Kepala Dinas kepada Bupati. Keberhasilan kinerja IKU terkait langsung dari keberhasilan kinerja indikator program. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Peternakan dan Perikanan dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan diatas dapat dilihat dalam tabel 2.3 berikut.

Tabel 2.3

Penetapan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Dinas Peternakan dan Perikanan

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL KINERJA	TARGET CAPAIAN TAHUN		KONDISI AKHIR KINERJA
			2024	2025	2026	
1	Produksi perikanan budidaya (benih ikan)	x 1000 ekor	1.897.670,07	1.906.989,00	1.916.523,00	1.916.523,00
2	Jumlah produksi ikan (konsumsi)	ton	20.401,82	20.410,00	20.431,00	20.431,00
3	Produksi ikan hias	ekor	2.607.529,00	2.685.107,00	2.765.660,00	2.765.660,00
4	Produksi daging (ruminansia dan non ruminansia)	ton	17.382,73	17.152,71	17.187,01	17.187,01
5	Produksi Telur	ton	18.419,71	17.978,34	18.005,22	18.005,22
6	Produksi susu	ton	915.963,58	888.959,91	889.169,87	889.169,87

Tabel 2.4

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL KINERJA (TAHUN 2024)	TARGET TAHUN 2025	REALISASI SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025
1	Produksi perikanan budidaya (benih ikan)	x 1000 ekor	1.897.670,07	1.906.989,00	668.536,00
2	Jumlah produksi ikan (konsumsi)	ton	20.401,82	20.410,00	6.129,60
3	Produksi ikan hias	ekor	2.607.529,00	2.685.107,00	870.006,00
4	Produksi daging (ruminansia dan non ruminansia)	ton	17.382,73	17.152,71	3.328,11
5	Produksi Telur	ton	18.419,71	17.978,34	3.340,90
6	Produksi susu	ton	915.963,58	888.959,91	222.167,23

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang terdapat beberapa isu penting sebagai berikut:

1. Ketergantungan bahan baku pakan impor.
2. Ancaman Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS).
3. Tingginya alih fungsi lahan pertanian;
4. Kurang optimalnya pelestarian dan pengembangan sumberdaya genetik ternak lokal;
5. Kurang optimalnya usaha pembibitan/pembenihan dan penyediaan bibit ternak lokal dan benih ikan yang berkualitas;
6. Kurang optimalnya usaha ternak/ikan secara berkelanjutan dan berdaya saing;
7. Kurangnya pengetahuan, keterampilan dan sikap SDM serta kelembagaan peternak /pembudidaya ikan belum optimal;
8. Skala usaha peternakan dan perikanan di mayarakat masih kecil sehingga kurang menguntungkan;

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja dan Pendanaan harus ditindaklanjuti dengan menyusun kebijakan publik baik dalam kerangka deregulasi maupun kerangka anggaran dalam APBD Tahun 2025 yang dalam pelaksanaannya dengan memaksimalkan sumber daya yang ada terutama sumber daya anggaran. Penyusunan kerangka pendanaan ini didasarkan pada skala prioritas dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Secara keseluruhan Perubahan Renja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang Tahun 2025 terdiri dari 9 program, 20 kegiatan dan 41 sub kegiatan dengan pagu anggaran penetapan sebesar Rp. 11.740.644.695,- dan pagu anggaran perubahan sebesar Rp. 13.038.758.255,06.

Rekapitulasi atas program kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Peternakan dan Perikanan Tahun 2025 disajikan pada Tabel 3.1. sebagai berikut:

Tabel 3.1. Rekapitulasi atas program kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Peternakan dan Perikanan Tahun 2025

No	Program	Pagu Indikatof (Rp)		Bertambah/Berkurang	Persentase (%)
		APBD 2025	Perubahan 2025		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.005.083.147,00	8.649.177.218,00	-355.905.929,00	-3,95
2	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	952.412.427,00	1.010.517.908,00	58.105.481,00	6,10
3	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	24.002.230,00	132.208.830,00	108.206.600,00	450,82
4	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	506.994.000,00	484.417.508,06	-22.576.492,00	-4,45
5	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	369.296.649,00	1.924.636.009,00	1.555.339.360,00	421,16
6	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	276.800.000,00	255.467.420,00	-21.332.580,00	-7,71
7	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	389.547.151,00	370.269.345,00	-19.277.806,00	-4,95
8	Program Perizinan Usaha Pertanian	30.909.091,00	32.527.511,00	1.618.420,00	5,24
9	Program Penyuluhan Pertanian	185.600.000,00	179.536.506,00	-6.063.494,00	-3,27

Adapun rincian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 disajikan pada Tabel 3.2. sebagai berikut:

Tabel 3.2. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
						DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN				11.926.974.309,00	11.740.644.695,00	13.038.758.255,06	
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				11.926.974.309,00	11.740.644.695,00	13.038.758.255,06	
	3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				10.430.352.838,00	10.488.491.804,00	10.276.321.464,06	
1	3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	8.985.543.964,00	9.005.083.147,00	8.649.177.218,00	
	3	25	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang tersusun	23 Dokumen	23 Dokumen	38.818.640,00	38.818.640,00	38.818.640,00	
	3	25	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	5.045.700,00	5.045.700,00	4.429.741,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
	3	25	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20 Laporan	20 Laporan	33.772.940,00	33.772.940,00	34.305.378,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
	3	25	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang dilaksanakan	100 persen	100 persen	7.646.616.803,00	7.650.884.809,00	7.650.884.809,00	
	3	25	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56 Orang/bulan	56 Orang/bulan	7.561.938.803,00	7.569.351.049,00	7.250.165.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)
	3	25	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN							
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	24 Dokumen	24 Dokumen	84.678.000,00	81.533.760,00	79.386.408,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
	3	25	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum yang dilaksanakan	100 persen	100 persen	93.480.000,00	110.480.000,00	110.480.000,00	
	3	25	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	93.480.000,00	110.480.000,00	60.078.300,00	Dana Alokasi Umum (DAU)

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
	3	25	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang yang dilaksanakan	100 persen	100 persen	63.903.200,00	62.940.685,00	62.940.685,00	
	3	25	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	44.530.000,00	44.520.533,00	65.626.600,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
	3	25	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	19.373.200,00	18.420.152,00	18.420.152,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
	3	25	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang yang dilaksanakan	100 persen	100 persen	163.277.500,00	163.276.200,00	163.276.200,00	
	3	25	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	18.557.500,00	18.556.200,00	11.793.500,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
	3	25	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	144.720.000,00	144.720.000,00	144.720.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
	3	25	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang yang dilaksanakan	100 persen	100 persen	979.447.821,00	978.682.813,00	978.682.813,00	
	3	25	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	53 Unit	53 Unit	445.478.440,00	445.478.440,00	447.398.840,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
	3	25	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit	40 Unit	28.600.000,00	28.514.992,00	28.514.992,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
	3	25	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	500.309.381,00	499.629.381,00	499.278.307,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
	3	25	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	30 Unit	30 Unit	5.060.000,00	5.060.000,00	5.060.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
2	3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Cakupan pengelolaan perikanan budidaya	100 persen	100 persen	939.012.644,00	952.412.427,00	1.010.517.908,00	
	3	25	04	2.02		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Cakupan kelompok yang terfasilitasi pemberdayaan	100 persen	100 persen	173.442.190,00	181.842.190,00	181.842.190,00	
	3	25	04	2.02	0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil							
							Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	3 Kelompok	3 Kelompok	20.329.090,00	20.329.090,00	13.595.118,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
	3	25	04	2.02	0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil							

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
							Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	14 Kelompok	14 Kelompok	6.629.200,00	6.629.200,00	3.624.100,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
	3	25	04	2.02	0003	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha							
							Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya	5 Kelompok	5 Kelompok	135.555.900,00	141.155.900,00	150.770.585,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
	3	25	04	2.02	0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan							
							Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	1 Kelompok	1 Kelompok	10.928.000,00	13.728.000,00	62.271.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
	3	25	04	2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Cakupan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	100 persen	100 persen	765.570.454,00	770.570.237,00	770.570.237,00	
	3	25	04	2.04	0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota							

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
							Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4 Dokumen	4 Dokumen	18.136.250,00	18.136.250,00	11.311.650,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
	3	25	04	2.04	0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota							
							Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Unit	1 Unit	361.614.294,00	361.014.077,00	361.014.077,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	3	25	04	2.04	0004	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota							
							Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	4 Dokumen	4 Dokumen	14.923.750,00	14.923.750,00	11.643.250,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
	3	25	04	2.04	0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota							
							Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 Unit	2 Unit	215.026.555,00	215.026.555,00	218.487.875,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	3	25	04	2.04	0010	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat							

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
							Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	40 Unit	40 Unit	155.869.605,00	161.469.605,00	177.800.253,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
3	3	25	05			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Cakupan pengembangan pengawasan sumberdaya perikanan	100 persen	100 persen	24.002.230,00	24.002.230,00	132.208.830,00	
	3	25	05	2.01		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Persentase penebaran ikan di perairan umum	100 persen	100 persen	24.002.230,00	24.002.230,00	24.002.230,00	
	3	25	05	2.01	0007	Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota							
							Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	80 Pelaku Usaha	80 Pelaku Usaha	24.002.230,00	24.002.230,00	132.208.830,00	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
4	3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Cakupan optimalisasi pengolahan dan pemasaran produksi perikanan Angka konsumsi ikan	23,1 kg/kapita/tahun 100 persen	23,1 kg/kapita/tahun 100 persen	481.794.000,00	506.994.000,00	484.417.508,06	
	3	25	06	2.01		Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Persentase Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan (KUSUKA)	100 persen	100 persen	9.979.000,00	12.779.000,00	12.779.000,00	
	3	25	06	2.01	0005	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko							
							Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko	1 Dokumen	1 Dokumen	9.979.000,00	12.779.000,00	10.792.200,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
	3	25	06	2.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Persentase Pembinaan Mutu Olahan Hasil Perikanan	100 persen	100 persen	21.000.000,00	23.800.000,00	23.800.000,00	
	3	25	06	2.02	0002	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko							

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
							Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	150 Unit Usaha	150 Unit Usaha	21.000.000,00	23.800.000,00	23.800.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)
	3	25	06	2.03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase fasilitasi penyediaan bahan baku pengolahan ikan	100 persen	100 persen	450.815.000,00	470.415.000,00	470.415.000,00	
	3	25	06	2.03	0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota							
							Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4,8 Ton	4,8 Ton	343.815.000,00	360.615.000,00	340.025.308,06	Dana Alokasi Umum (DAU)
	3	25	06	2.03	0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota							

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
							Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	200 Pelaku Usaha	200 Pelaku Usaha	107.000.000,00	109.800.000,00	109.800.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
	3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				1.496.621.471,00	1.252.152.891,00	2.762.436.791,00	
5	3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Cakupan penyediaan dan pengembangan sarana produksi peternakan	100 persen	100 persen	337.700.000,00	369.296.649,00	1.924.636.009,00	
	3	27	02	2.02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan	4 Dokumen	4 Dokumen	108.500.000,00	125.300.000,00	125.300.000,00	
	3	27	02	2.02	0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman							
							Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	2 Dokumen	2 Dokumen	51.500.000,00	59.900.000,00	48.901.040,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
	3	27	02	2.02	0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman							
							Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	2 Dokumen	2 Dokumen	57.000.000,00	65.400.000,00	624.722.120,00	Dana Alokasi Umum (DAU)

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
	3	27	02	2.05		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	100 persen	100 persen	229.200.000,00	243.996.649,00	243.996.649,00	
	3	27	02	2.05	0004	Penjaminan Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan							
							Jumlah HPT, Bahan Pakan/Pakan yang Beredar	240 Ton	240 Ton	80.000.000,00	89.196.649,00	87.997.569,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
	3	27	02	2.05	0008	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak							
							Jumlah benih/bibit ternak yang beredar	2 Laporan	2 Laporan	149.200.000,00	154.800.000,00	1.163.015.280,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
6	3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Cakupan Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Produksi Peternakan	100 Persen	100 Persen	536.500.000,00	276.800.000,00	255.467.420,00	
	3	27	03	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Pembangunan Prasarana Peternakan yang terbangun/terpelihara	4 Unit	0 Unit	262.500.000,00	0,00	0,00	
	3	27	03	2.02	0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani							

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
							Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit	0 Unit	262.500.000,00	0,00	0,00	
	3	27	03	2.03		Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	100 persen	100 persen	274.000.000,00	276.800.000,00	276.800.000,00	
	3	27	03	2.03	0001	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak							
							Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan	12 Laporan	12 Laporan	274.000.000,00	276.800.000,00	255.467.420,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
7	3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Cakupan pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan	100 Persen	100 Persen	408.712.380,00	389.547.151,00	370.269.345,00	
	3	27	04	2.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan pencegahan penyakit hewan menular	100 persen	100 persen	35.000.000,00	34.920.566,00	34.920.566,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
	3	27	04	2.01	0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota							
							Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	12 Laporan	12 Laporan	35.000.000,00	34.920.566,00	31.824.206,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
	3	27	04	2.02		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	100 persen	100 persen	192.287.300,00	170.453.000,00	170.453.000,00	
	3	27	04	2.02	0004	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)							
							Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	12 laporan	12 laporan	118.469.300,00	96.635.000,00	97.778.822,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
	3	27	04	2.02	0007	Analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya							
							Jumlah analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	8 Laporan	8 Laporan	73.818.000,00	73.818.000,00	76.442.355,00	Dana Alokasi Umum (DAU)

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
	3	27	04	2.04		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Pengawasan Kesehatan Masyarakat Veteriner	100 persen	100 persen	181.425.080,00	184.173.585,00	184.173.585,00	
	3	27	04	2.04	0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan							
							Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	12 Laporan	12 Laporan	102.764.900,00	102.723.654,00	97.237.416,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
	3	27	04	2.04	0004	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner							
							Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	4 Dokumen	4 Dokumen	68.533.000,00	68.533.000,00	57.948.967,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
	3	27	04	2.04	0008	Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Kesmavet dan Kesejahteraan Hewan							
							Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhadap kesmavet dan kesejahteraan hewan	40 Orang	40 Orang	10.127.180,00	12.916.931,00	9.037.579,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
8	3	27	06			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Cakupan pengawasan peredaran obat hewan	100 Persen	100 Persen	30.909.091,00	30.909.091,00	32.527.511,00	
	3	27	06	2.03		Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan	Persentase pengawasan peredaran obat hewan	100 persen	100 persen	30.909.091,00	30.909.091,00	30.909.091,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
	3	27	06	2.03	0002	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan							
							Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Diawasi	12 Laporan	12 Laporan	30.909.091,00	30.909.091,00	32.527.511,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
9	3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Cakupan pembinaan kelompok ternak	100 Persen	100 Persen	182.800.000,00	185.600.000,00	179.536.506,00	
	3	27	07	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Fasilitasi Pembinaan Kelompok Ternak	100 persen	100 persen	182.800.000,00	185.600.000,00	185.600.000,00	
	3	27	07	2.01	0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa							
							Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	30 Unit	30 Unit	52.800.000,00	55.600.000,00	53.594.260,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
	3	27	07	2.01	0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian							
							Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	1 Unit	1 Unit	130.000.000,00	130.000.000,00	125.942.246,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
									JUMLAH	**11.926.974.309,00**	**11.740.644.695,00**	**13.038.758.255,06**	

BAB IV
PENUTUP

Penyusunan Dokumen Perubahan Renja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang Tahun 2025 merupakan bagian penting dalam rangka mengatasi kesenjangan dan ketidaksesuaian yang terjadi setelah dilaksanakan pelaksanaan evaluasi atas pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan I tahun 2025 sebagai pedoman dan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025. Selanjutnya Perubahan Renja Dinas Peternakan dan Perikanan ini dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKAP) Perangkat Daerah dan kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kabupaten.

Penyusunan Dokumen Perubahan Renja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang Tahun 2025, diharapkan dapat menjadikan landasan dalam mewujudkan sistem perencanaan dan kinerja yang lebih baik, menuju tercapainya hasil pembangunan sehingga masyarakat Kabupaten Magelang akan lebih sejahtera.

Kota Mungkid, 3 Juli 2025
KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN MAGELANG,

JONI INDARTO, AP., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19741204 199311 1 001

BUPATI MAGELANG,

GRENGSENG PAMUJI

ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	KEPALA DISPETERIKAN	KABAG PEREKONOMIAN DAN SDA	KABAG HUKUM